

ABSTRAK

Perkawinan campuran memberikan akibat hukum bagi WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA yakni tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, karena tanah tersebut menjadi bagian dari harta bersama perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan di Indonesia yang menganut asas Nasionalisme. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu putusnya perkawinan karena kematian yang akan mengakibatkan munculnya hak waris atas kepemilikan harta bersama. Salah satu hak waris yang didapat oleh istri ialah tanah. Salah satu contoh kasus sengketa tanah atas perkawinan campuran yaitu putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 yang akan dibahas pada penelitian ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah benar memutuskan perkara putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 dengan alasan *judex juris* dan *judex facti* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Setelah diperiksanya berkas perkara bahwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan benar adanya bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah menguasai dan menguasai objek perkara yang seharusnya dimiliki oleh penggugat.

Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah, dan Perkawinan Campuran

ABSTRACT

*Mixed marriages have legal consequences for Indonesian citizens who marry foreign nationals, namely that they cannot have land ownership rights, because the land is part of the joint marital property based on land regulations in Indonesia which adhere to the principle of Nationalism. One of the problems that often occurs is the dissolution of marriage due to death which will result in the emergence of inheritance rights to joint property ownership. One of the inheritance rights obtained by the wife is land. One example of a land peace case for mixed marriages is decision number 705 PK / Pdt / 2014 which will be discussed in this study. This writing uses a normative legal research method with a regulatory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed and then conclusions are drawn descriptively qualitatively. The results of this study are that the judge has correctly decided the case of decision number 705 PK / Pdt / 2014 on the grounds of *judex juris* and *judex facti* which have been determined by the Medan High Court. After examining the case files, it was found that they were in accordance with existing legal regulations, and it was true that defendant 1 and defendant 2 had controlled and managed the object of the case that should have been owned by the plaintiff.*

Keywords: Land Ownership Rights, and Mixed Marriage